



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kepala BNPB
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 30 Mei 2023
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan RKP Tahun 2024
Ketua Rapat	: Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, SS., M.Si
Hadir	: 1. 26 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Kepala BNPB (Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M); 3. Para Eselon I BNPB beserta Jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dengan didampingi oleh Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, M.P.A., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda membahas "Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024" disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Indikatif BNPB Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.957.233.799.000,-** (*Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:

NO	UNIT KERJA ESELON I	PAGU INDIKATIF
I	PROGRAM KETAHANAN BENCANA	Rp.693.969.490.000,-
1	DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGIS	Rp. 9.688.200.000,-
2	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	Rp.176.675.178.000,-
3	DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT	Rp.260.948.888.000,-
4	DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Rp. 14.545.000.000,-
5	DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN	Rp. 16.077.300.000,-
6	PUSDATINKOM	Rp. 82.191.600.000,-
7	PUSDALOPS	Rp.133.843.324.000,-
II	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp.263.264.309.000,-
1	PUSDIKLAT PB	Rp. 8.495.200.000,-
2	SEKRETARIAT UTAMA	Rp.247.816.609.000,-
3	INSPEKTORAT UTAMA	Rp. 6.952.500.000,-
JUMLAH		Rp.957.233.799.000,-

Pembicaraan lebih lanjut mengenai pagu indikatif BNPB Tahun Anggaran 2024 akan dibahas dengan Eselon I BNPB.

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan penambahan Anggaran BNPB Tahun 2024 sebesar **Rp.1.000.000.000.000,-** (*Satu Triliun Rupiah*) yang akan dialokasikan untuk:
 - a. Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana, Pemetaan Risiko Bencana, dan Analisis Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana.
 - b. Pengadaan Peralatan Peringatan Dini Teknologi Modern, Penguatan Respon Sistem Peringatan Dini dan Sosialisasi dan Edukasi Mitigasi Bencana.
 - c. Pendampingan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 - d. Pendampingan Inventarisasi, Analisis Kebutuhan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana, Verifikasi Usulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Pemantauan Progres Pelaksanaan Pemulihan Pascabencana Penerima Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - e. Dukungan Operasi Penanganan Darurat Bencana, Pengerahan Sumber Daya Darurat, Penanganan Korban dan Pengungsi.
 - f. Penyediaan Bantuan Logistik dan Peralatan serta Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan.
 - g. Penyediaan Bantuan PUSDalops Daerah, Pemeliharaan Sarana Prasarana (TIK), Lisensi dan Pengelolaan *Call Center* PUSDalops.
 - h. Penyusunan Rencana Strategis BNPB Tahun 2024-2029 dan Koordinasi Teknis Perencanaan Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI Meminta BNPB untuk merinci penambahan anggaran tahun 2024.

3. Komisi VIII DPR RI meminta kepada BNPB untuk memfokuskan program prioritas nasional antara lain; resiliensi bencana dan dampak perubahan iklim.
4. Apabila usulan tambahan anggaran tahun 2024 sebagaimana di maksud di point 2 disetujui maka akan dilakukan pembahasan khusus bersama Komisi VIII DPR RI.
5. Komisi VIII DPR RI akan mengundang Kementerian Keuangan dan Bapenas untuk membahas anggaran Penanggulangan Bencana yang tiap tahunnya terus terjadi penurunan.
6. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meminta kepada BNPB untuk memiliki pemetaan resiko bencana secara lebih komprehensif yang mencakup seluruh Indonesia.
 - b. Melakukan pembahasan kembali Revisi UU Penanggulangan Bencana yang diinisiasi oleh Pemerintah/BNPB.
 - c. Meningkatkan responsibilitas terhadap kejadian bencana yang kerap terjadi di daerah yang rawan bencana .
 - d. Mensinergikan program dan kegiatan bersama kementerian / lembaga lainnya agar terjalin kerjasama yang efektif dan berdampak langsung dan dirasakan masyarakat.
 - e. Menyelesaikan tunggakan pembayaran eks relawan Pulau Galang pasca covid19 sebesar Rp.8,4 Miliar yang sampai sekarang belum terselesaikan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

Dr. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si